



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.798, 2020

KEMENDAGRI. Kabupaten Intan Jaya. Kabupaten Mimika. Provinsi Papua. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA DENGAN
KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Intan Jaya dengan Kabupaten Mimika Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA DENGAN KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Mimika adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.
2. Kabupaten Intan Jaya adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua.
3. Provinsi Papua adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
5. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
6. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Intan Jaya dengan Kabupaten Mimika Provinsi Papua dimulai dari:

- a. Pertigaan batas antara Kabupaten Intan Jaya dengan Kabupaten Mimika dan Kabupaten Paniai yang ditandai TK 1 dengan koordinat $4^{\circ} 1' 56.423''$ LS dan $137^{\circ} 05' 41.926''$ BT yang terletak pada batas Distrik Dumadama Kabupaten Paniai dengan Distrik Ugimba Kabupaten

- Intan Jaya dan Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika;
- b. TK 1 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung gunung (*igir*) sampai pada TK 2 dengan koordinat $4^{\circ} 2' 11.553''$ LS dan $137^{\circ} 06' 03.024''$ BT yang terletak pada batas Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika;
 - c. TK 2 selanjutnya ke arah timur menyusuri punggung gunung (*igir*) sampai pada TK 3 dengan koordinat $4^{\circ} 2' 5.591''$ LS dan $137^{\circ} 06' 23.413''$ BT yang terletak pada batas Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika;
 - d. TK 3 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung gunung (*igir*) sampai pada TK 4 dengan koordinat $4^{\circ} 1' 45.090''$ LS dan $137^{\circ} 06' 34.971''$ BT yang terletak pada batas Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika; dan
 - e. TK 4 selanjutnya ke arah timur menyusuri punggung gunung (*igir*) sampai pada TK 5 dengan koordinat $4^{\circ} 1' 52.960''$ LS dan $137^{\circ} 07' 05.981''$ BT yang terletak pada pertigaan batas antara Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika dan Distrik Beoga Barat Kabupaten Puncak Provinsi Papua.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kampung dan/atau nama distrik.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Intan Jaya dengan Kabupaten Mimika Provinsi Papua dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri Dalam Negeri ini berlaku maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 163 Tahun 2004 tentang Penentuan Batas Wilayah Kabupaten Mimika dengan Kabupaten Paniai dan Kabupaten Puncak Jaya di Gunung Grasberg dan sekitarnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

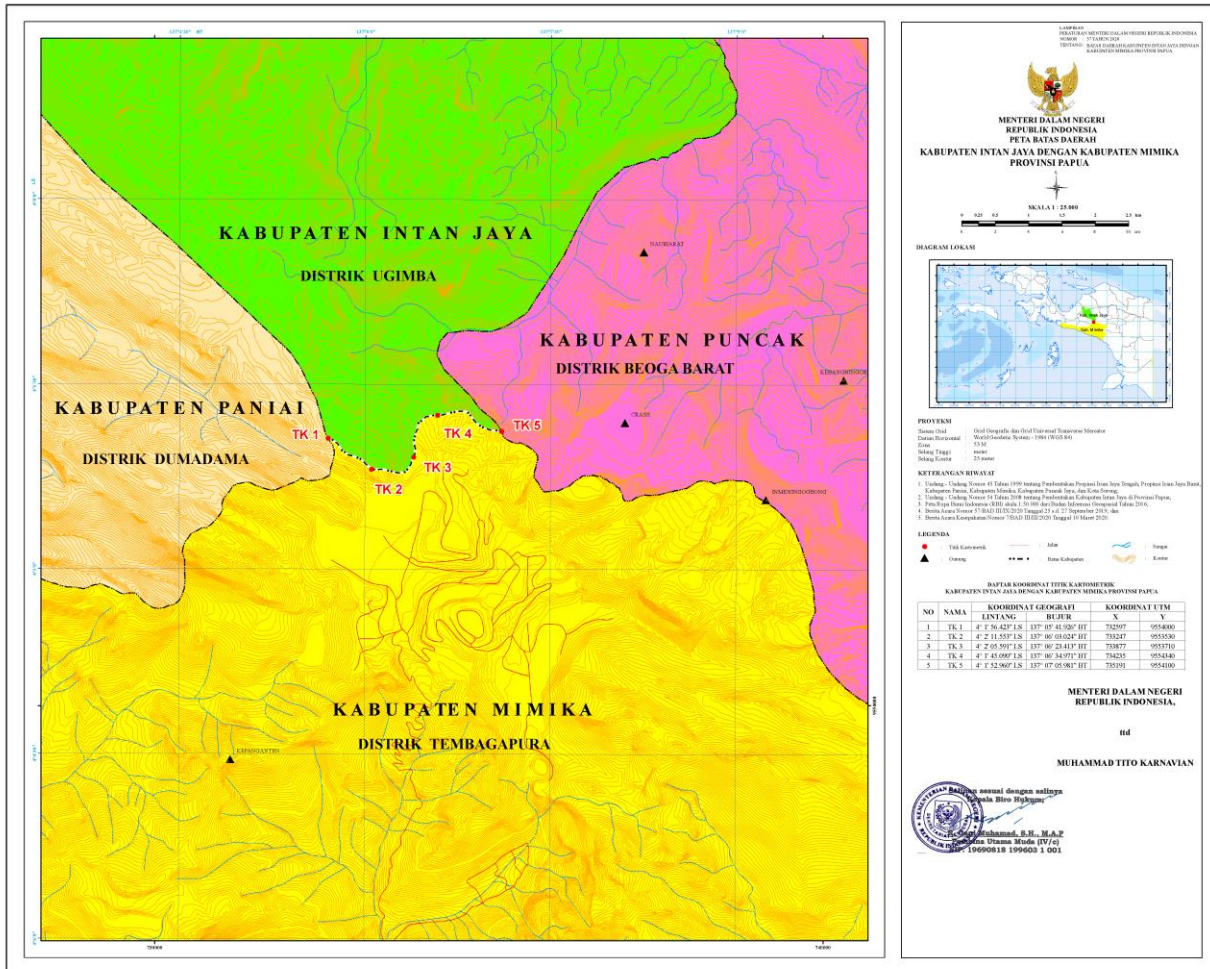
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA




MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PETA BATAS DAERAH
KABUPATEN INTAN JAYA DENGAN KABUPATEN MIMIKA
PROVINSI PAPUA



SKALA 1 : 25.000


DIAGRAM LOKASI



PROVINSI
 Nama: Papua
 Kode: 91
 Ibu Kota: Jayapura
 Luas: 320.529 km²
 Penduduk: 4.000.000 jiwa
 Bahasa: Indonesia, Inggris, Melayu, dan berbagai bahasa daerah

KEPERANGAN KHAWAIF

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Papua Barat, Tanggal: 15 Desember 1999
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua
3. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya No. 1/2002 tentang Pembentukan Kecamatan dan Desa
4. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika No. 1/2002 tentang Pembentukan Kecamatan dan Desa
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika No. 1/2002 tentang Pembentukan Kecamatan dan Desa


LEGENDA

- Titik Koordinat
- Jalan
- Sungai
- ▲ Gunung
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

DAFTAR KOORDINAT TITIK KAWAIF
 KABUPATEN INTAN JAYA DENGAN KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFI		KOORDINAT UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK 1	4° 1' 36,42" LS	137° 07' 41,50" BT	732097	9554300
2	TK 2	4° 2' 11,55" LS	137° 06' 03,02" BT	732247	9553530
3	TK 3	4° 2' 05,59" LS	137° 06' 24,41" BT	731877	9553710
4	TK 4	4° 1' 43,00" LS	137° 06' 34,07" BT	732352	9554140
5	TK 5	4° 1' 32,90" LS	137° 07' 05,98" BT	732192	9554100

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
 id
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN


 sesuai dengan salinan
 Asli
 Muhammad, S.T., M.A.P.
 Kepala Dinas Monev (IV/c)
 19990818 1994603 1 001